

Masyarakat Akademik Indonesia

* Sebuah Refleksi

BERSAMA pembaca *Arena* yang lain, saya ikut bersedi mendengar kabar pembekuan majalah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tersebut. Sebagai seorang akademikus, saya terlanjur bangga dan gembira bahwa di negeri ini masih ada majalah secendekia, seideal dan sekritis *Arena*. Sebagai orang di luar IAIN, saya iri karena di kampus sendiri sudah lama tak ada majalah sebagus itu.

Tetapi semua pujian itu tidak menyatakan bahwa pembredelan *Arena* merupakan sebuah kejutan. Peristiwa seperti itu sama sekali tidak aneh bila dipahami pada konteks zamannya. Bahkan kejadian seperti itu sudah dapat diduga sebelumnya.

Catatan ini berupaya memahami hikmah kasus *Arena* dalam konteks makro masyarakat akademik Indonesia mutakhir. Sebagai pengamat luar yang bersympati pada seluruh pengasuh *Arena* dan juga pimpinan IAIN, saya tidak berwenang mempersoalkan seluk-beluk dan rincian detail kasus itu sendiri.

Hak dan tanggung jawab

Tak ada hak tanpa tanggung jawab. Tak ada tanggung jawab tanpa hak. Begitu bunyi sebuah pikiran yang dikenal baik oleh para mahasiswa filsafat sejak di tahun kuliah pertama.

Tidak ada kekuasaan dan

kemerdekaan yang secara etis dapat disebut sebagai "hak" apabila hal itu tidak dilengkapi dengan "tanggung jawab" secara berimbang. Tanpa perimbangan tanggung jawab itu kemerdekaan menjadi mubazir atau palsu. Kekuasaan menjadi liar, sewenang-wenang atau tirani.

Sebaliknya, tak ada kewajiban yang dapat dijalankan dan dituntut sebagai "tanggung jawab" dari seseorang apabila ia tidak diberi peluang, kepercayaan, kebebasan, atau hak menjalankannya. Seseorang tidak bertanggung jawab atas sebuah bencana, apabila ia memang tidak diberi hak, kesempatan atau kekuasaan untuk mengendalikan atau menghindarkan terjadinya bencana itu.

Sebuah angan-angan filsafat dan etika yang indah. Dalam kenyataan hidup sehari-hari di dunia, ceritanya lain. Juga dalam masyarakat kita. Banyak orang yang hidup dalam kelimpahan hak-hak istimewa tanpa dituntut bertanggung jawab secara setimpal. Sebaliknya, kebanyakan orang terus-menerus dituntut dan dicekik untuk menjalankan tanggung jawab yang dituntut itu.

Hal seperti itu kita jumpai hampir dalam semua bidang kehidupan. Dari dunia kesenian, jurnalistik, politik, ekonomi, hingga teknologi. Dunia akademik dan pers mahasiswa tak

luput dari epidemi rusaknya etika padanan hak dan tanggung jawab itu.

Kasus *Arena* sama sekali tidak unik. Persis seperti pers mahasiswa di kampus-kampus lain di negeri ini, ia dibebani kontradiksi hak dan tanggung jawab. Di satu pihak, para mahasiswa pengelola pers diberi peluang memproduksi terbitan. Tapi mereka tidak diberi kesempatan mempertanggungjawabkan terbitan mereka. Di pihak lain, pimpinan lembaga pendidikan tinggi dituntut bertanggung jawab atas segala kegiatan kampus, termasuk penerbitan pers mahasiswa. Padahal, pimpinan lembaga ini pada prakteknya tidak langsung terlibat dalam penerbitan mahasiswa.

Dari sudut pandang kita

jawab. Mereka boleh berkegiatan tanpa bertanggung jawab. Akibatnya, lingkup kegiatan mahasiswa dibatasi sejauh yang direlakan oleh pihak lain yang dituntut bertanggung jawab. Ini jelas sangat mengekang dan mendorong mahasiswa bersikap memberontak.

Sesama korban

Dari sudut pandang di atas, baik para mahasiswa maupun para rektor kita pada hakikatnya adalah orang-orang yang senasib. Keduanya adalah korban dari suatu kekacauan distribusi hak dan tanggung jawab di bidang akademik. Menyediakan apabila kedua pihak ini saling bermusuhan. Selayaknya mereka justru bekerjasama, karena adanya kepentingan bersama

saling merugikan, nyatanya ketegangan seperti itu terjadi di banyak kampus di Indonesia. Mengapa? Tentu ada sebabnya yang pantas dikaji secara analitis, walau tak dapat sepenuhnya dijelaskan.

Biar pun tadi dikatakan rektor dan mahasiswa adalah sesama korban, posisi mereka tidaklah sederajat. Yang satu korban kakap, yang lain korban teri. Bandingkan dengan para wanita sebagai korban patriarki dan seksisme. Ada wanita kaya, keturunan bangsawan, profesional, atau berkulit putih yang tidak menderita separah wanita mlarat, keturunan budak, dan berkulit hitam.

Itu sebabnya tidak semua wanita mendukung emansipasi kaum wanita. Bahkan, seperti halnya para rektor dan mahasiswa, banyak wanita saling bersengketa ditonton para lelaki. Malahan di antara sesama aktifis feminism bisa terjadi konflik serupa.

Akar persoalan

Sudah bukan menjadi rahasia bagi khalayak bahwa akar dari persoalan yang diuraikan di atas sebenarnya cukup gamblang. Yakni, represi oleh pemerintah terhadap otonomi kampus dan kebebasan intelektual para mahasiswa dengan mengatasnamakan stabilitas dan keamanan.

Keadaan ini punya sejarah yang panjang dan tidak mungkin diuraikan di sini. Berbeda

dari tahun-tahun sebelum 1978, represi itu tidak banyak yang dikerjakan langsung oleh aparat keamanan negara. Tetapi dengan menggunakan perwakilannya di kampus. Dari aparat administrasi rektoriat, lembaga-lembaga resmi kemahasiswaan (khususnya senat mahasiswa dengan menobatkan rektor sebagai perwakilan lembaga stabilitas dan keamanan).

Dalam tata hubungan kampus seperti ini, seorang rektor boleh-boleh saja secara pribadi merasa bersympati pada mahasiswa. Atau, tidak suka pada wewenang besar yang diberikan kepadaanya. Tapi secara formal ia wajib mengutamakan stabilitas dan keamanan. Bila perlu dengan bertindak represif terhadap pikiran kritis di kampusnya dan menomor-duakan pertumbuhan keilmuan.

Ia mungkin seorang rektor yang menderita secara batin dan perlu dikasihani. Ia juga bisa menjadi seorang mediator yang arif dan bijak. Tetapi ia juga bisa jauh lebih kejam dan represif terhadap warga akademiknya daripada yang diminta pemerintah.

Konon ada beberapa simpatian *Arena* yang berharap agar rektor IAIN mencairkan kembali pembekuan majalah itu. Harapan itu bisa dinyatakan dengan irama yang bermacam-macam. Mulai dari yang paling lembut ("memohon" atau "mengimbau"), hingga yang paling keras ("menuntut"). Tapi semua itu pada prakteknya sama-sama

mengakui rektor sebagai puncak wewenang atau sumber pokok nasib pers mahasiswa. Entah itu diartikan dengan "dana" ataupun "keabsahan" resmi. Semua itu mengukuhkan aturan resmi yang diberlakukan pemerintah di dunia akademik dengan menobatkan rektor sebagai perwakilan lembaga stabilitas dan keamanan.

Harapan-harapan seperti itu belum membahayakan *status quo*, dan karena itu tak perlu diwaspadai pemerintah. Harapan-harapan itu tidak menggugat kesenjangan hak dan tanggung jawab di antara rektor dan mahasiswa. Rektor masih dianggap penanggung jawab tertinggi semua kegiatan mahasiswa.

Akan lain halnya, apabila suatu hari kelak yang diminta bukan lagi izin atau dana rektor bagi pers mahasiswa, melainkan kebebasan pers mahasiswa atau kegiatan lain dari campur tangan siapa pun. Termasuk dari rektor. Artinya, rektor dibebaskan dari beban yang selama ini tidak pernah dimintanya tapi ditimpakan padanya dan terlalu merepotkan ia. Yakni, mengawasi atau bertanggung jawab atas terbitan pers mahasiswa Indonesia yang semakin lama semakin cerdas dan suka mencerdaskan orang lain. ***

*) Ariel Heryanto, staf pengajar Pasca Sarjana UKSW Salatiga